

**KIPRAH PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN
DI PANGGUNG POLITIK
(Studi Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh
YULI PURWANTI
NPM. 1531040066

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**KIPRAH PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN
DI PANGGUNG POLITIK
(Studi Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh
YULI PURWANTI
NPM. 1531040066

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

KIPRAH PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN DI PANGGUNG POLITIK (Studi Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Bandar Lampung)

**OLEH:
YULI PURWANTI**

Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat masih belum sejajar, terbukti dengan minimnya keikutsertaan perempuan dalam pembuatan peraturan daerah. Kiprah anggota dewan perempuan merupakan kemampuan kerja, keterlibatan atau sumbangsih dalam pembuatan peraturan daerah untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Undang-Undang No 2 tahun 2008 pembentukan partai politik pasal 2 ayat (2) yang berbunyi bahwa pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Dalam hal kuota pengajuan ini anggota dewan perempuan di Bandar Lampung jika dilihat dari seluruh anggota dewan yang berjumlah 50 orang, anggota perempuan hanya 6 orang atau 8,3% jauh dari kuota yang telah ditetapkan yaitu 30%. Penyebab tidak tercapainya keterwakilan anggota perempuan yaitu kebijakan publik yang belum memihak dan adil terhadap perempuan disebabkan karena semua partai politik masih memiliki paradigma yang sama untuk merauk suara sebanyak mungkin untuk kursi DPRD, perkara afirmasi untuk mempromosikan perempuan di parlemen tidak menjadi prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kiprah anggota dewan perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung dalam badan pembuatan peraturan daerah (BPPD) dan untuk mengetahui apa saja upaya-upaya anggota dewan perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kiprahnya pada badan pembuatan peraturan daerah (BPPD). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan sifat penelitian deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 3 anggota dewan perempuan yang terlibat dalam pembuatan peraturan daerah (BPPD), sedangkan sumber data sekundernya adalah buku, jurna, artikel, dan dokumentasi terkait objek penelitian. Hasil dari penelitian kiprah perempuan dalam kepemimpinan di panggung politik (studi anggota dewan perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung) dalam pembuatan peraturan daerah adalah menjaring aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak, serta mendorong terbentuknya peraturan daerah perlindungan perempuan dan upaya-upaya untuk meningkatkan kiprahnya dalam pembuatan peraturan daerah yaitu: *Pertama*, aktif menyerap aspirasi masyarakat, *kedua*, melalui kaukus perempuan parlemen, dan *ketiga*, mempunyai pandangan dan wawasan yang luas.

Kata Kunci: Kiprah Anggota Dewan Perempuan, Badan Pembuatan Peraturan Daerah (BPPD)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuli Purwanti
NPM : 1531040066
Jurusan/ Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"KIPRAH PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN DI PANGGUNG POLITIK (Studi Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung)"**, merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikat atau pun mengambil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan Apabila dilain waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Bandar Lampung, November 2019
Yang Membuat Pernyataan,

Yuli Purwanti
NPM. 1531040066



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KIPRAH PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN DI
PANGGUNG POLITIK (Studi Anggota Dewan
Perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung)**

Nama : Yuli Purwanti

NPM : 1531040066

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.H.Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag
NIP. 195808231993031001**

**Dr.Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**Dr.Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP.197801302011012004**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KIPRAH PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN DI PANGGUNG POLTIK (Studi Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung)** Disusun oleh **YULI PURWANTI NPM 1531040066** Jurusan **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Selasa, 17 Desember 2019.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Malik Ghozali, M.A

Sekretaris : Yoga Irawan, M.Pd

Penguji Utama : Dr. Nadirsah Hawari, M.A

Penguji Pendamping I : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag

Penguji Pendamping II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi
Agama**

**Dr. H. M. Afif Anshori, M.A
NIP. 196003131989031004**

MOTTO

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya: hadist dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: *“setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang di pimpinnya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin didalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggungjawabnya tersebut”*. (HR. Bukhari).



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Kedua orang tuaku tercinta papi Ali Kasim dan Mami Salmah yang memberikan dukungan dan doa yang tak pernah terputus selama hidupku. Apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan air mata. Terima kasih untuk dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian.
2. Kedua adikku yang kusayangi, Maygi Ardianto dan Alinda Puspita sari tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian semoga kita bisa menjadi putra dan putri yang dapat membagakan orang tua.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Yuli Purwanti dilahirkan di Way kanan, provinsi Lampung, pada tanggal 26 September 1996. Yuli Purwanti anak pertama dari tiga bersaudara, ayah bernama Ali Kasim dan ibu bernama Salmah.

Pendidikan yang penulis tempuh diawali di SDN Bojong Menteng IV Rawa Lumbu kota Bekasi pada tahun 2003 dan lulus tahun 2009. Setelah lulus SD penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 02 Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan pada tahun 2009 dan lulus tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan SMAN 01 Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan pada tahun 2012 dan lulus tahun 2015 dan penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama jurusan Pemikiran Politik Islam pada tahun 2015 dan lulus tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik (Studi Anggota Dewan Perempuan di DPRD kota Bandara Lampung)”, salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Allah, nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. DR. H. Mohammad Mukri, M.Ag** selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. **Bapak M. Afif Anshori** selaku Dekan Fakultas Ushuluddi dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. **Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** selaku ketua jurusan Pemikiran Politik Islam dan **Ibu Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si** selaku sekretaris jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah membantu dan mempermudah segala urusan yang menyangkut jurusan.
4. Bapak **Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag** selaku pembimbing I dan **Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik
5. **Ibu Dr. Siti Ba'diah, M.Ag** selaku pembimbing akademik yang telah memberi saran dan motivasi kepada penulis.

6. Kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
7. Anggota Dewan Perempuan Kota Bandar Lampung periode 2014-2019 dan Ibu Silvia Damayanti bagian Umum terima kasih untuk waktunya yang telah menyempatkan waktu sebagai sumber data dalam skripsi.
8. Teman hidupku kelak yang masih menjadi rahasia ilahi, dan untuk seseorang direleng hati percaya lah bahwa hanya ada satu namamu yang selalu kusebut dalam setiap doaku, semoga keyakinan dan takdir ini terwujud, insha Allah jodohnya kita bertemu atas ridho dan izin Allah SWT.
9. Sahabat Musang Squad (Emilia Susanti, Nilam Pelita Bhakti, Eka Zalika Salamiah, Veny Alvionita, Zesy Harviliyana Citra, Fakhurrazi, Sandra Wijaya, Muhammad Ilham, dan Ahmad Guntur Saputra), terima kasih atas kebersamaannya, canda tawa yang kita alami akan menjadi kenang.
10. Keluarga KKN kelompok 127 desa Bumi Daya 2 Kecamatan Palas yang telah banyak memberikan pengalaman berharga dan terkhusus (Annisa Audina, Zainab Zalfa Assegaf, S.H, Nepi Lavela) terima kasih untuk 30 hari kebersamaan yang bermakna yang membentuk kita sebagai sahabat baru, canda tawa dan suka duka kita akan menjadi kenangan terindah.
11. Sahabatku Maissy Resa Safitri, Suparman, Dea Maya Sari S.sos, dan Eko Purwanto S.sos yang selalu ada disampingku, terima kasih untuk dukungan dan motivasi yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahku.

12. Teman-teman seperjuangan Pemikiran Politik Islam 2015 semangat selalu untuk S.Sos.

13. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf yang turut memberikan literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi pribadi penulis, masyarakat dan jurusan Pemikiran Politik Islam. Semoga semua kebaikan dan keikhlasan membantu penulis akan mendapat berkah Allah SWT.

Bandar Lampung
Penulis

Yuli Purwanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Metodologi Penelitian.....	9

BAB II KEPIMPINAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA POLITIK

A. Kepemimpinan Perempuan.....	15
B. Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam	19
C. Lembaga Politik.....	22
1. Pengertian Lembaga Politik.....	22
2. Fungsi Lembaga Politik	23
3. Lembaga Eksekutif	23

4. Lembaga Legislatif	25
5. Lembaga Yudikatif	27
6. Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Hak DPRD.....	28
D. Tinjauan Pustaka.....	32

BAB III PROFIL DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Kota Bandar Lampung	34
1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	34
2. Letak Geografis Kota Bandar Lampung	37
B. DPRD Kota Bandar Lampung	38
1. Profil DPRD Kota Bandar Lampung	38
2. Keanggotaan Dewan perempuan DPRD Kota Bandar Lampung	48
C. Kegiatan Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung dalam Pembuatan Peraturan Daerah	51

BAB IV KIPRAH ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM BADAN PEMBUATAN PERATURAN DAERAH

A. Kiprah Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung Dalam Hal BPPD (Badan Pembuatan Peraturan Daerah)	60
B. Upaya-Upaya Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung Meningkatkan Kiprahnya Dalam Hal BPPD (Badan Pembuatan Peraturan Daerah)	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Anggota Dewan Perempuan	5
2. Daftar Nama Anggota Komisi I Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD)	39
3. Daftar Nama Anggota Komisi II Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD).....	39
4. Daftar Nama Anggota Komisi III Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD).....	40
5. Daftar Nama Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD)	41
6. Daftar Nama Anggota Badan Pembuatan Peraturan Daerah (BPP).....	41
7. Daftar Nama Anggota Badan Musyawarah	43
8. Daftar Nama Anggota Badan Anggaran.....	44
9. Daftar Nama Anggota Badan Kehormatan.....	46
10. Klarifikasi Jumlah Peraturan Daerah DPRD Kota Bandar Lampung 2014-2019	50

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Erika Novalia Sani, SH anggota Dewan Perempuan DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Nasdem mendapat piagam penghargaan dari Badan Kehormatan karena selalu hadir dalam kegiatan sidang paripurna Anggota	61
2. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung memimpin sidang paripurna dalam pembahasan Raperda Usul Inisiatif BP2D tentang Perlindungan perempuan(BPP)	63
3. Wakil ketua BP2D Sri Ningsih Djamsari menyampaikan pandangannya terhadap usul inisiatif perlindungan perempuan.....	64
4. Pebriana Piska menyampaikan permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan Badan Musyawarah	64
5. Penyerahan hasil reses mengenai masalah kaum perempuan sehingga menjadi usul inisiatif dewan Badan Musyawarah	65
6. Erika Novalia Sani menyampaikan aspirasi masyarakat terutama masalah yang dihadapi kaum perempuan Badan Musyawarah	66
7. Penyerahan hasil reses mengenai masalah	
8. kaum perempuan sehingga menjadi usul inisiatif dewan	67



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Konsultasi Bimbingan
2. Surat Keputusan Bimbingan Skripsi
3. Pedoman Wawancara
4. Hasil Wawancara
5. Surat penelitian
6. Surat Kesbangpol
7. Dokumentasi Wawancara
8. Kertas Keterangan Plagiarisem



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik (Studi Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung)”. Maksud judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu menguraikan definisi pokok yang ada dalam judul proposal ini, hal ini agar lebih mudah memahami dan juga mengarah pada penelitian yang sesuai dengan dikehendak oleh penulis. Berikut ini istilah-istilah yang ada dalam judul Skripsi ini:

Kiprah perempuan merupakan kemampuan kerja, cara pandang, dan reaksi seorang perempuan (orang yang mahir/aktif/berperan/berdaya) terhadap ideologi atau institusinya.¹ Kepemimpinan di panggung politik merupakan tempat atau wadah anggota perwakilan rakyat untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang ditujukan untuk masyarakat. Kepemimpinan politik merupakan suatu hal yang pokok dalam sistem politik, kerja sama untuk mencapai suatu tujuan.² Kualitas seorang pemimpin politik sangat menentukan keberhasilan lembaga atau organisasi, dapat mempengaruhi orang lain dan menentukan jalan serta perilaku yang harus dikerjakan bersama-sama. Kepemimpinan politik memegang peranan

¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 735.

² Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal itu?*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 5.

yang sangat penting dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi sehingga sering dikatakan bahwa sukses atau gagal yang dialami sebagian besar pemimpin politik itu sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimilikinya.

Dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bandar Lampung (DPRD Kota Bandar Lampung) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di kota Bandar Lampung, provinsi Lampung. Dalam pemilu 2014, DPRD kota Bandar Lampung menempatkan 50 orang wakilnya, dari 50 orang tersebut keanggotaan perempuannya hanya 6 orang.

Seperti yang kita tahu bahwa ada 3 fungsi dari DPRD adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam DPRD Kota Bandar Lampung terdapat 4 badan yang terdiri dari badan musyawarah, kehormatan, badan pembuatan peraturan daerah (BPPD), dan badan anggaran. Anggota dewan perempuan yang bergerak dalam pembuatan peraturan daerah (BPPD) ada 3, mereka telah membentuk peraturan daerah tentang pansus perlindungan perempuan perda tersebut dibuat untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan.

Berdasarkan istilah-istilah dalam pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa judul skripsi “Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik (Studi Anggota Dewan Perempuan di DPRD Bandar Lampung)” adalah untuk mengkaji keterlibatan, sumbangsih, dan kemampuan kerja anggota dewan perempuan dalam pembuatan peraturan daerah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah mengenai kiprah anggota dewan perempuan dalam pembuatan peraturan daerah, karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa kekuasaan perempuan adalah kekuasaan yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, seperti yang kita ketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan masih belum bisa diatasi. Untuk mewujudkan peraturan daerah yang muatannya sensitif dan responsif terhadap perempuan maka peraturan daerah yang dihasilkan harus memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai persoalan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan spesifik perempuan. Harapan adanya hukum melalui substansi peraturan daerah yang bukan saja dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan tetapi juga mewujudkan keadilan bagi perempuan.

2. Alasan Subjektif

- a. Dari judul yang diangkat ada relevannya dengan fakultas Ushuluddin jurusan Pemikiran Politik Islam “Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik (Studi Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung)”.
- b. Lokasi penelitian mudah dijangkau dapat memudahkan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Politik pemerintahan, sebagaimana yang kita ketahui warga negara memiliki hak dalam politik pemerintahan yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hak memilih dimaksud merupakan keikutsertaan dalam menguasai kursi eksekutif dan kursi legislatif dengan secara langsung ikut andil dalam menyusun, merancang dan menjalankan kebijakan yang berpengaruh bagi semua warga negara.

Kepemimpinan perempuan dalam era pembangunan baik sekarang maupun masa akan datang mempunyai potensi dan peran yang besar dalam perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya pada semua tingkat internasional dan regional. Namun realitasnya kepemimpinan perempuan dalam berbagai hal tersebut sering kali berhadapan dengan diskriminasi, stereotipe dan stigma mengenai kelemahan-kelemahan perempuan dikaitkan dengan fisik dan psikologis bukan pada kemampuan intelektualnya.

Perempuan harusnya memanfaatkan peluang yang sama dalam berpartisipasi pada pengambilan keputusan yang akan berpengaruh bagi kehidupannya. Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pembuatan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan adalah salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Peran tersebut pula harus nampak pada setiap pembuatan kebijakan di DPRD serta pengambilan keputusan.³

³ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 23.

Undang-Undang No 2 tahun 2008 pembentukan partai politik pasal 2 ayat (2) yang berbunyi bahwa pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan.⁴ Dalam hal kuota pengajuan ini anggota dewan perempuan di Bandar Lampung jika dilihat dari seluruh anggota dewan yang berjumlah 50 anggota perempuan hanya 6 orang atau 8,3% jauh dari kuota yang telah ditetapkan yaitu 30%. Penyebab tidak tercapainya keterwakilan anggota perempuan yaitu kebijakan publik yang belum memihak dan adil terhadap perempuan disebabkan karena semua partai politik masih memiliki paradigma yang sama untuk merauk suara sebanyak mungkin untuk kursi DPRD, perkara afirmasi untuk mempromosikan perempuan di parlemen tidak menjadi prioritas.

DPRD Kota Bandar Lampung berjumlah anggotanya 50 orang yang terdiri 6 orang perempuan didalamnya. 6 anggota dewan perempuan sebagai berikut:

Tabel.1
Anggota Dewan Perempuan

No.	Nama	Fraksi	Komisi
1.	Hj. Ernita, S.H., M.h	Demokrat	2
2.	Sri Ningsih Djamsari	PDIP	2
3.	Hj. Wiwik Anggaraini, S.E	PDIP	3
4.	Erika Novalia Sani, S.H	Nasdem	3
5.	Nani Mayasari	Nasdem	4
6.	Pebriana Piska, S.P., M.H	Demokrat	4

Sumber: Bagian Persidangan DPRD Kota Bandar Lampung

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2).

DPRD ini mempunyai 8 fraksi yakni fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, PAN, PDIP, PKB dan PKS. Komisi yang menangani masalah kiprah perempuan dalam kepemimpinan di panggung politik berada di komisi II, III dan IV.⁵ Dari masing-masing komisi tersebut bergerak dalam bidang sebagai berikut:

1. Komisi II: Membidangi Perekonomian dan Keuangan yang Meliputi Perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, perternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, dunia usaha dan penanaman modal, keuangan daerah, asset daerah, perpajakan, retribusi, perbankan dan perusahaan daerah dan perusahaan patungan.
2. Komisi III: membidangi Pembangunan yang meliputi Pekerjaan Umum, Pemetaan, Penataan dan Pengawasan, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan hidup.
3. Komisi IV: membidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan olahraga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bahaya Kebakaram, Museum dan Cagar Budaya.

⁵ Erika Novalia Sani, Wawancara dengan penulis, Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, 21 Januari 2019.

Memperoleh kekuasaan baik pria atau wanita tidak menjamin bahwa kepemimpinan mampu mempengaruhi orang lain. Kekuasaan saja tidaklah cukup, pemimpin yang berhasil harus yakin benar bahwa gagasannya untuk diajukan kepada orang lain dan orang lain menganggap pemimpinnya sebagai seorang figur otoritas.⁶

DPRD kota Bandar Lampung memiliki 4 badan yaitu badan badan musyawarah, badan kehormatan, badan pembuatan peraturan daerah, dan badan anggaran. Dari 4 badan tersebut anggota dewan perempuan berkiprah pada badan pembuatan peraturan daerah salah satunya komisi III membidangi Pembangunan yang meliputi Pekerjaan Umum, Pemetaan, Penataan dan Pengawasan, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan hidup. Anggota perempuan yang bergerak di komisi III membentuk peraturan daerah yang menjabarkan dari pasal 27 UUD 1945 yaitu pansus perlindungan perempuan, perda tersebut melakukan kegiatan memperjuangkan upah kerja untuk para perempuan pesisir, pembuatan E-KTP dan lain-lain. Dari pembentukan perda yang dilakukan tersebut merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi, walaupun keputusan tidak selalu merupakan pemecahln masalah dari suatu masalah, bila keputusan tersebut tidak tepat. Dengan kegiatan yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh besar ketika anggota dewan perempuan turut andil dalam pembuatan peraturan daerah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Ketika kita telah mengetahui pengaruh yang ditimbulkan seharusnya menumbuhkan kesadaran untuk kita para perempuan untuk berkiprah atau

⁶ Dorothy W. Cantor dan Toni Bernay bersama Jean Stoess, *Women In Power (Kiprah Wanita dalam Dunia Politik)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 79.

terjun dalam politik karena hal itu bisa membantu hak-hak perempuan agar tidak ada pembeda lagi antara laki-laki dan perempuan terutama dalam bidang politik. Seperti yang kita lihat bahwa kekuasaan perempuan adalah kekuasaan yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. kekuasaan ini bukanlah untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri atau memanipulasi orang lain.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meninjau, meneliti dan selanjutnya dituangkan kedalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul: “Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik (Studi Anggota Dewan Perempuan di DPRD Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka ada beberapa pokok masalah yang mendasari, yaitu:

1. Bagaimana kiprah anggota dewan perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung dalam Badan pembuatan Peraturan Daerah (BPPD)?
2. Apa saja upaya-upaya anggota dewan perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung meningkatkan kiprahnya dalam Badan pembuatan Peraturan Daerah (BPPD)?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji dari kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mengetahui kiprah anggota dewan perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung dalam Badan pembuatan Peraturan Daerah (BPPD).
2. Mengetahui upaya meningkatkan kiprah anggota dewan perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung dalam Badan pembuatan Peraturan Daerah (BPPD).

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun orang lain. maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk keilmuan politik islam serta dapat mempraktikan kebijakan dan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian lain dimasa mendatang, terutama untuk mahasiswa Jurusan pemikiran politik islam, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Secara Praktis

Peneliti Sebagai mahasiswa jurusan pemikiran politik islam (PPI) penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan lingkungan sosial masyarakat khususnya dibidang pemikiran politik islam mengenai kiprah perempuan dalam kepemimpinannya dipangung politik, sehingga nantinya dapat diketahui begitu pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembuatan peraturan daerah di Kota Bandar Lampung untuk Kesejahteraan perempuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian ini dapat didefinisikan merupakan penelitian dengan memperoleh data dilapangan. penelitian lapangan merupakan metode untuk mengetahui permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat secara realistis. Penelitian lapangan bertujuan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan mengangkat realita tersebut secara faktual kemudian menginterpretasikan data yang diperoleh berdasarkan referensi yang relevan.⁷

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan yang berhubungan dengan Kiprah Anggota Dewan Perempuan dalam Pembuatan Peraturan Daerah di DPRD Kota Bandar Lampung.

⁷ Kartono kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari informan.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya ada 3 orang dari Anggota Dewan Perempuan DPRD Kota Bandar Lampung yaitu:

- 1) Sri Ningsih Djamsari, dari Fraksi PDIP Komisi II
- 2) Erika novalia sani, dari Fraksi Nasdem Komisi III
- 3) Pebriana Piska, dari Fraksi Demokrat Komisi IV

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dengan cara data dari buku-buku, karya-karya, jurnal, internet, literatur, dan dokumentasi terkait objek penelitian.

Kedua data tersebut digunakan untuk saling melengkapi data dilapangan yang terkadang tidak relevan jika tidak ditunjang dengan kepustakaan. maka data yang tekkumpul dapat diuji kebenarannya.⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan informasi yang didapat melalui suatu metode untuk dikelola dan dianalisis dengan metode tertentu mengenai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian sehingga diperoleh data yang benar-benar relevan. Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁸ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 81.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan pengamatan langsung dalam keadaan yang sebenarnya terhadap suatu objek. Dengan peneliti melakukan observasi, peneliti dapat menyajikan gambaran perilaku atau kejadian sehingga dapat menganalisis data yang tidak sesuai dari data yang diperoleh dari para responden melalui interview. Mengingat data yang terkadang diperoleh dari interview dipengaruhi oleh orang menyampaikan informasi tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh adalah data yang akurat kebenarannya.⁹

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk komunikasi secara verbal seperti percakapan tatap muka langsung antara peneliti dan narasumber yang bertujuan memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu penulis telah membuat daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis sehingga penulis telah mengetahui informasi apa yg ingin ditanyakan terhadap responden. Sehingga penulis dapat memahami tentang Kiprah Anggota Dewan Perempuan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah di DPRD Kota Bandar Lampung.

⁹*Ibid*, h. 85.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menganalisis peraturan-peraturan, buku-buku, dokumen/surat-surat, majalah, notulen rapat, catatan harian. Dalam memperoleh informasi ada tiga jenis sumber yang diperhatikan yaitu: kertas atau orang (*people*), tempat (*place*), dan tulisan (*paper*).

d. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari beberapa metode yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengolah data yang sudah diperoleh menggunakan cara klarifikasi atas segala jawaban agar data yang sudah didapatkan mampu dianalisa sesuai dengan data lapangan, analisis ini memakai teknik analisis kualitatif yang digambarkan menggunakan kata ataupun kalimat selanjutnya dipisahkan sesuai dengan kategori agar dapat menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir secara induktif. Metode induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari penjelasan-penjelasan bersifat khusus lalu yang bersifat umum. dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi. Maka dari itu perlu diingat dengan teliti seperti yang telah disampaikan semakin lama waktu penelitian lapangan maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Agar perlu dilakukan penganalisan data dengan reduksi data, mereduksi data merupakan mengambil intisari,

memilih hal yang terpenting, dicari dengan tema dan pola, dengan seperti itu data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan peneliti dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.¹⁰

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang muncul berdasarkan data dengan berwujud kata-kata dan bukan merupakan angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif yang menggambarkan variabel satu persatu dengan tujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci dalam mengidentifikasi masalah.

Perolehan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan dalam metode deskriptif yaitu metode yang dipakai dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan analisis kesimpulan tersebut maka akan menjawab segala permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 247.

BAB II KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA POLITIK

A. Kepemimpinan Perempuan

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.

Perempuan dilampung dianggap sebagai ratu. Di lampung menganut sistem kekeluargaan patrilineal tapi sangat menghormati wanita. Hal ini terlihat dengan menggunakannya sigokh sebagai simbol orang lampung, dimana kebanyakan suku lain menggunakan senjata sebagai simbolnya seperti kujang, mandau, keris.¹¹

Wanita dalam persepsi kultur jawa dipahami sebagai “wani ditata” yang berarti berani ditata atau bersedia diatur (oleh pria). Feodalisme dalam kata wanita sangat tampak yakni bahwa pria adalah pihak yang memiliki kuasa penuh atas wanita. Wanita adalah sosok yang menjadi sebagaimana yang diinginkan pria. Wanita mengobjekan dirinya kepada pria. Dia menjadi abdi bagi pria tentunya posisi wanita lebih rendah dari pria. Tanpa pria wanita tak

¹¹ <http://m.kaskus.co.id/seputar-tentang-lampung-fakta-dan-mitosnya/> (15 Agustus 2019).

berarti apa-apa. Sifat yang melekat dari wanita juga cenderung pasif seperti lemah, gemulai, sabar, halus tunduk, patuh, mendukung, berdarma, berbakti, mendampingi, mengabdikan dan menyenangkan pria. Karena itulah akhirnya lahir istilah wanita sebagai kanca wingking atau suargo nunut neroko katut.

Secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan¹² perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsuai atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek jadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schen dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti like, wish, desire, aim. kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampainya wanted. Jadi, wanita adalah who is being wanted (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.¹³ Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.

¹² Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 1.

¹³ Maggi Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), h. 501.

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan.¹⁴ Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria, feminis tertentu.

Dalam Ensiklopedi Islam, wanita atau Perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar'ah, jamaknya al-Nisa sama dengan wanita, Perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria.¹⁵ al-Nisa dalam arti gender Perempuan seperti surat al-Nisa ayat 7 dan 32 yang menerangkan tentang hak-hak wanita. Porsi pembagian dalam ayat ini tidak semata-mata ditentukan oleh realitas biologis sebagai wanita atau laki-laki, melainkan berkaitan erat dengan realitas gender yang ditentukan oleh faktor budaya yang bersangkutan. Sementara itu besar kecilnya porsi pembagian peran ditentukan oleh faktor eksternal, atau menurut istilah ayat ini, ditentukan oleh usaha yang bersangkutan.

Dari beberapa konsep pengertian tentang perempuan dan laki-laki yang diungkapkan, maka timbul perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara alami (biologis) dalam berbagai konteks budaya seringkali mendasari deferensiasi peran (*division of labor*) yang ada. Akibatnya sering terjadi ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan

¹⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: MandarMaju, 1989), h.4.

¹⁵ <https://www.repo.iain-TulungAgung.ac.id>.

ciri biologisnya serta sifat-sifat senantiasa diidentikkan dengan orientasi instrumental, yakni aktif, penonjolan diri, pelindung dan pemimpin. Perempuan dengan ciri biologisnya diidentikkan dengan sifat emosional seperti pasif, berkorban untuk feminim yakni berkaitan dengan orientasi keperluan orang lain, tergantung pemberi cinta dan pengasuh.

Dikalangan masyarakat kita, kuatnya pengaruh budaya patriarki yang membedakan antara kekuasaan laki-laki dengan perempuan yang didasarkan pada peran gender tradisional masih tetap melingkupi berbagai aspek kehidupan yang ada. Meskipun gerakan emansipasi telah mampu menjadi lokomotif penggerak masuknya peran ke berbagai sektor publik (pendidikan, ekonomi, industri) namun, kenyataan yang ada masih memperlihatkan bahwa diantara mereka banyak yang hanya terlibat pada bidang-bidang yang merupakan kepanjangan dari peran gender tradisional.

Hingga saat ini ideologi patriarki yang menempatkan kedudukan laki-laki diatas perempuan dan segala sesuatu yang dimiliki perempuan (*stereotyp*) yang memberikan pelabelan atau penandaan tertentu terhadap laki-laki dan perempuan masih tetap mengakar dan meresap dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat kita. Lain pula dengan laki-laki, perempuan yang memimpin suatu organisasi juga memiliki sifat atau ciri-ciri kepribadian yang halus, lembut dan bersifat bijaksana terhadap bawahannya dapat memimpin dengan sukses. Dalam kepemimpinan seperti yang disebutkan diatas, banyak terjadi negosiasi dan penyesuaian yang tidak dapat di toleransi oleh banyak orang. Seringkali keputusan yang diambil berdasarkan pada kasus/individu bukan generalisasi belaka.

B. Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam

Diantara kaum yang tertindas didunia ini, kaum perempuan berada dideretan teratas.¹⁶ Salah satu dari aspek tertindasnya itu adalah adanya pemahaman yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. M.Said Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa pada dasarnya masalah yang sering dijadikan lahan empuk yang digunakan untuk menggugat islam dalam hal kesetaraan kaum perempuan dan laki-laki adalah masalah kepemimpinan.¹⁷ Bila kita lirik sekarang masih banyak kaum perempuan yang cukup mahir dalam dunia kepemimpinan.

Partisipasi kaum perempuan semakin lama semakin meningkat dan mendominasi, hal ini dikarenakan bakat kegigihannya dalam menyerukan kesamaan hak-haknya dengan kaum laki-laki, termasuk dalam menyangkut persoalan kepemimpinan. Tuntutan persamaan hak perempuan ternyata didasarkan kepada beberapa anggapan bahwa perempuan dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan, hanya kesempatan berkembanglah yang membedakannya.

Diskursus perempuan dalam islam mendapat perhatian yang sangat serius. Peran dan fungsi perempuan menjadi pokok perhatiannya. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki dalam pandangan islam didudukkan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas dalam Hadist tentang Tanggung jawab manusia:

¹⁶ Kaukab Siddique, *Mengugat Tuhan Yang Maskulin*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 15.

¹⁷ M.Said Ramadhan Al-Bathi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2002), h. 109.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya: hadist dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “*setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang di pimpinnya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin didalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggungjawabnya tersebut*”. (HR. Bukhari Muslim).

Hadist di atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga. Baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Secara pribadi, seseorang diberi tugas menjaga dirinya sendiri. Pemuka atau Imam diberi tugas memimpin rakyatnya. Suami bertugas memimpin dan menjaga istrinya. Seorang istri diberi amanat memimpin anak-anak suaminya. Pembantu diberi tugas menjaga harta atau kekayaan tuan dan anak diberi tugas menjaga kekayaan orang tuanya. Tugas adalah amanat. Apa pun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya di hadapan yang dipimpin dan di dalam pengadilan Allah Swt kelak. Tak seorang pun mampu melepaskan diri dari tanggungjawab itu.

Akan tetapi perspektif yang lain perempuan didudukkan sebagai obyek yang harus di pimpin oleh laki-laki: “*lelaki adalah pemimpin bagi kaum*

perempuan” (Q.S An-Nisa ayat 34) bukan berarti perempuan tidak mendapat kedudukan yang layak perempuan dalam batasan tertentu malah menjadi sebuah tonggak negara, dengan peran serta mendidik keturunan.¹⁸

Al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak kaum laki-laki diantaranya dalam masalah kepemimpinan. Al-Qur'an memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan monopoli kaum laki-laki tetapi bisa diduduki dan diajbat oleh perempuan bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria maka ia boleh menjadi hakim dan perdana menteri dan kepala negara.

Hadirnya gerakan perempuan di belahan dunia membawa imbas pengaruh ke dalam nuansa pergerakan perempuan indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam bentuk munculnya ide-ide emansipatif.¹⁹ Negara demokrasi seperti indonesia sudah seyogyanya perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam membangun bangsa sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 (1) menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintah dalam pengecualian. Pasal ini menunjukkan kepedulian terhadap hak asasi sekaligus keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi diantara warga negara. Selain itu tidak ada peraturan tertulis yang melarang perempuan menjadi seorang

¹⁸ Hibbah Rauf Izzi, *Wanita dan politik Pandangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), h. 120.

¹⁹ Riant Nugroho, *Gender dan strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87.

pemimpin. Misalnya Tap MPR No.II/973 menyatakan, baik perempuan ataupun laki-laki selama memenuhi karakteristik seorang pemimpin negara diperbolehkan untuk maju dan dipilih masyarakat sebagai seorang presiden. Berdasarkan prinsip etis agama khususnya islam tidak sedikitpun mengisyaratkan hal-hal yang berhubungan dengan diskriminasi terhadap perempuan, bahkan sebaliknya islam telah menjamin hak-hak perempuan sebagai hak yang diberikan kepada laki-laki termasuk hak untuk menjadi pemimpin.

C. Lembaga Politik

1. Pengertian Lembaga Politik

lembaga politik secara umum adalah suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Adapun beberapa definisi lembaga politik menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Kamanto Soenarto, lembaga politik suatu badan di lingkungan negara yang mengkhususkan diri terhadap pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Sehingga lembaga politik di Indonesia mencakup lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, keamanan, pertahanan nasional dan partai politik.
- b. Surbakti, lembaga politik adalah pranata yang memegang monopoli penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu.

²⁰ Paul Rosyadi, *Lembaga-Lembaga Politik*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1984), h.6.

- c. J.W.Schorel, lembaga politik adalah badan yang mengatur dan memelihara tata tertib dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa dan karismatik.

2. Fungsi Lembaga Politik

- a. Bekerja sama untuk merumuskan norma-norma kenegaraan yang diwujudkan dalam undang-undang dan disahkan oleh pemerintah.²¹
- b. Lembaga politik berperan meningkatkan pelayanan kepada khalayak masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.
- c. Mempertahankan kedaulatan negara dari serangan fisik maupun ideologi serta mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi serangan dari luar yang membuat gejolak negara.
- d. Lembaga politik berperan untuk menjaga stabilitas di suatu negara baik dalam bidang ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik.
- e. Memelihara kehidupan politik negara agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Lembaga Eksekutif

Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif.²² Presiden, wakil presiden dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan. Lembaga eksekutif ini punya kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan dalam

²¹ *Ibid*, h. 11.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 295.

menjalankan pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

Beberapa contoh lembaga eksekutif sebagai berikut:

- a. Presiden, adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Presiden memiliki masa jabatan selama 5 tahun untuk satu periode. Namun, ia masih diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai presiden kembali untuk periode berikutnya.
- b. Wakil presiden, adalah jabatan yang satu tingkat berda dibawah presiden. Wakil presiden dapat diambil alih tugas dan jabatan bila presiden berhalangan.
- c. Menteri, adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya dipimpin oleh seorang presiden, ataupun perdana menteri.

Tugas dan wewenang lembaga eksekutif sebagai berikut:

- a. Melakukan kerja sama dan membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan perwakilan rakyat.
- b. Mengangkat perwakilan negara Indonesia (duta dan konsul) untuk negara-negara sahabat. Duta besar Indonesia ditempatkan di ibu kota negara sahabat, dan konsul merupakan lembaga dibawah kedutaan besar Indonesia di negara lain.
- c. Menerima dan menjamu duta besar dari negara tetangga yang datang ke Indonesia.

- d. Memberikan tanda jasa, gelar dan tanda kehormatan lainnya pada warga negara Indonesia / asing yang memiliki jasa bagi Indonesia.

4. Lembaga Legislatif

Legislatif yaitu lembaga yang membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik badan legislatif adalah lembaga yang "LEGISLATIF" atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nama lain yang sering dipakai adalah parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dapat dikatakan bahwa badan legislatif merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa legislatif adalah lembaga yang membuat kebijakan atau undang-undang yang merupakan badan pembuat keputusan menyangkut kepentingan umum dan dalam hal ini legislatif di daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Beberapa contoh lembaga legislatif sebagai berikut:

²³*Ibid*, h. 315.

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai lembaga negara, DPR adalah mereka yang menjadi anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu dan terpilih. Tugas DPR:

- 1) Memilih anggota BPK secara langsung
- 2) Mengajukan tiga orang hakim konstitusi
- 3) Memberi persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, damai dan perjanjian dengan negara lain.
- 4) Mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD merupakan perwakilan dari masing-masing provinsi yang terpilih saat pemilu. Tugas DPD:

- 1) Mengajukan rancangan UUD yang berhubungan dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya.
- 2) Memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK
- 3) Memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai RUU APBN

d. Majelis Permusyawarah Rakyat (MPR), lembaga legislatif yang didalamnya terdiri dari anggota DPR Dan DPD yang terpilih dalam pemilu. Tugas MPRD:

- 1) Membuat, menetapkan dan mengubah UUD
- 2) Melantik presiden dan wakil presiden
- 3) Memberhentikan presiden dan wakil presiden

5. Lemabaga Yudikatif

Lemabaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan UUD, dan pengawasan pelaksanaan hukum disuatu negara.²⁴

Beberapa contoh lembaga yudikatif sebagai berikut:

a. Mahkamah Agung (MA), merupakan lembaga yudikatif yang mempunyai kewenangan kehakiman. Kekuasaan tersebut dalam hal ini untuk penyelenggaraan peradilan dalam penegakan hukum yang adil.

Tugas MA:

- 1) Mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan
- 2) Memberikan pertimbangan kepada presiden tentang pemberian grasi dan juga rehabilitasi
- 3) Mengajukantiga orang hakim konstitusi

b. Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan lembaga yudiktif yang berwenang sebagai pengadilan di tingkat pertama dan terakhir.

²⁴*Ibid*, h. 350

Tugas MK:

- 1) Mengadili pada tingkat pertama sampai akhir putusan yang bersifat final untuk menguji UU
- 2) Memutuskan persengketaan yang terjadi
- 3) Memutuskan perselisuhan dan persengketaan yang berhubungan dengan hasil pemilu
- 4) Memutuskan pembubaran sebuah partai politik
- 5) Memberikan keputusan mengenai pendapat DPRD tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden sesuai dengan UU
- 6) Menerima usulan dari DPR perihal pemberhentian presiden dan wakil presiden dan segera menindaklanjutinya.

c. Komisi Yudisial (KY), merupakan lembaga yudikatif yang punya tugas dan wewenang:

- 1) Mengusulkan pengangkatan seorang hakim agung
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga pelaku hukum.

6. Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Hak DPRD

a. Fungsi DPRD

Secara normatif pada dasarnya kinerja pokok anggota DPRD disusun dan dinilai berdasarkan fungsi yang mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan Undang-undang

Nomor 34 tahun 2004, Undang-undang Nomor 27 tahun 2009, bahwa dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) mempunyai tiga fungsi:²⁵

- 1) Fungsi legislasi, yakni menyusun peraturan-peraturan daerah dengan baik dengan inisiatif mandiri atau bersama pemda
- 2) Fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RAPBD, dalam bentuk refleksi rencana program pemerintah daerah dalam bentuk angka.
- 3) Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, perda dan keputusan kepala daerah untuk memastikan berjalannya peraturan yang ada dalam kerangka optimalnya kinerja pemerintah daerah. Diharapkannya dalam penyelenggaraan pemerintah, pemda dan anggota DPRD dapat mewujudkan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif guna roda pemerintahan daerah agar berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam era reformasi, dapat memberikan kebijakan yang jelas terhadap masyarakat.

b. Tugas dan wewenang DPRD

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD

²⁵ Buku Selayang Pandang DPRD Kota Bandar Lampung, h. 35.

4) Mengusulkan:

- a) Untuk DPRD Provinsi, pengangkatan atau pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian
 - b) Untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan atau pemberhentian bupati/wakil bupati kepada gubernur melalui menteri dalam negeri
 - c) Untuk DPRD Kota pengangkatan atau pemberhentian walikota/wakil walikota kepada gubernur melalui menteri dalam negeri
- 5) Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tugas anggota DPRD adalah untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat guna mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan rasa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan membangun peran dan fungsi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004.

c. Hak DPRD

Anggota DPRD mempunyai hak-hak yang dapat digunakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, berdasar pasal 349 dan 366-368 UU Nomor 27 Tahun 2009 bahwa pelaksanaan hak terdiri dari:²⁶

- 1) Hak interpelasi, hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- 2) Hak angket, sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁶*Ibid*, h. 36.

- 3) Hak menyatakan pendapat, hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi ditanah air maupun di kancah internasional.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam dunia akademis ditemukan beberapa karya ilmiah yang mengkaji Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik (Studi Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kota di Bandar Lampung), Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

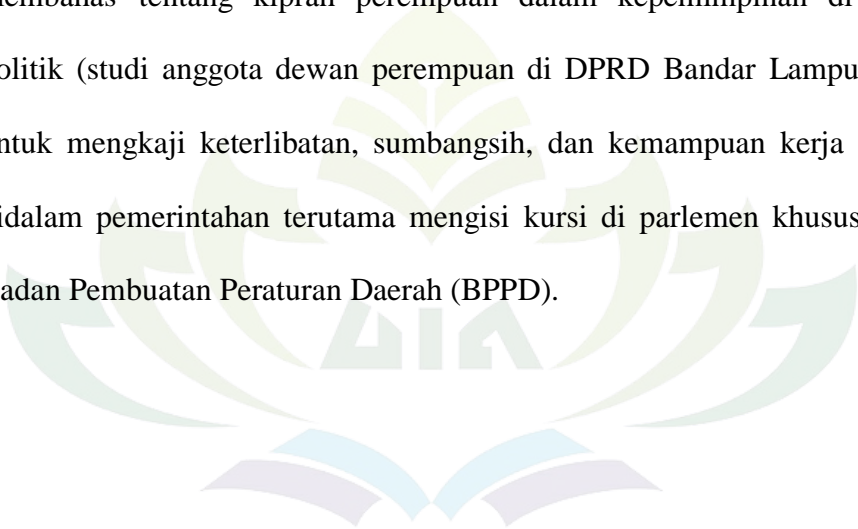
1. Karya Ilmiah yang berjudul kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014, karya Hanny Lestari, Universitas Negeri Semarang 2015.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran umum tentang keefektifan perempuan memimpin di lembaga legislatif yang berhubungan dengan kesetaraan gender terkhusus di DPRD Provinsi Jawa Barat.
2. Karya ilmiah yang berjudul analisis keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di kabupaten wajo, karya Elvi Mulyasari Akmul, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat kaum perempuan dalam jabatan politik sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan dan apa yang mempengaruhi

²⁷ Hanny Lestari, "Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014". (Skripsi Sarjana Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015).

²⁸ Elvi Mulya Akmul, "analisis keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di kabupaten wajo." (Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014).

rendahnya jumlah kaum perempuan dalam jabatan politik di kabupaten Wajo.

Dengan demikian dilihat dari beberapa judul tersebut ada persamaan dengan judul penelitian sekarang, yaitu membahas tentang peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi, perbedaannya jika judul diatas membahas tentang kedudukan anggota dewan perempuan dan keterlibatan perempuan dalam jabatan politik, sedangkan judul penelitian saat ini membahas tentang kiprah perempuan dalam kepemimpinan di panggung politik (studi anggota dewan perempuan di DPRD Bandar Lampung) adalah untuk mengkaji keterlibatan, sumbangsih, dan kemampuan kerja perempuan didalam pemerintahan terutama mengisi kursi di parlemen khususnya dalam Badan Pembuatan Peraturan Daerah (BPPD).



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Almond, Gabriel dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner. 2011.
- Baidan, Nasharuddin, dan Aziz, Erwati. *Etika Islam Dalam Bebisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Heywood, Andrew dalam Miriam Budiardji. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007
- Humm, Maggi. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka. 2002.
- Imam, Hidajat Imam. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press. 2009.
- Iqbal Hasan, M. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- *Pemimpin dan Kepemimpinan (apakah kepemimpinan abnormal itu?)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2004.
- *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: MandarMaju. 1989.
- Musdah Mulia, Siti. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Muthahari, Murtadlo. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: lentera. 2002.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengurus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.

- Rosyadi, Paul. *Lemabaga-Lembaga Politik*. Jakarta: Ind Hill Co. 1984.
- Ruauf Izzi, Hibbah. *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1997.
- Rival, Vethzal, dan Mulyadi, Deddy. *Kepemipinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada Rajawali Pers. 2012.
- Said Ramadhan Al-Bathi, M. *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*. Jakarta: Intermedia. 2002.
- Salim, Peter, dan Salim, Yeni. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press. 1991.
- Sealayang Pandang DPRD Kota Bandar Lampung
- Seta, Basri. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner. 2011.
- Siddique, Kaukab. *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*. Jakarta: Paramadina. 2002.
- Subhan, Zaitunah. *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.
- Thoha, Miftah. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2007.
- Zakub, Hamzah. *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*. Bandung: CV.Diponorogo. 2005.

Sumber Lain:

Jurnal:

- Hanny Lestari, “Kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014”. (Skripsi sarjana politik dan kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015).
- Elvi Mulya Akmul, “Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo”. (Skripsi sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014).

Undang-Undang:

- Undang-Undang No.2 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2) tentang Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Pedoman Peraturan Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Wawancara:

Erika Novalia Sani, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Kantor
DPRD Kota Bandar Lampung, 16 Agustus 2019.

Pebriana Piska, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Kantor DPRD
Kota Bandar Lampung, 12 September 2019.

Sri Ningsih Djamsari, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Kantor
DPRD Kota Bandar Lampung, 20 September 2019.

Sumber Online:

<https://m.kaskus.co.id/seputar-tentang-lampung-fakta-dan-mitosnya/> (15 Agustus
2019).

<https://Blogspot.com/wanita-dalam-budaya-jawa.html> (15 Agustus 2019).

<https://repo.iain-TulungAgung.ac.id> (11 September 2019).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/debat> (14 September 2019).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/aktif> (14 September 2019).